

Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran dan Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah

M. Sya'roni Rofii

Kandidat Doktor Bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Marmara University, Istanbul, Turki
E-mail: rofii_daun@yahoo.com

Abstract

Nuclear deal between Iran and the West has recently brought a significant impact on changing political map of the Middle East region. Many parties assumed that the nuclear agreement initiated by the United States is part of the scenario to keep the Middle East remained stable. For the past five years America was so overwhelmed in facing threats either by state actors or non-state. At least with the achievement of the Iranian nuclear deal America can be free from a potential direct threat of nuclear weapons. However, this step is not fully run smoothly because the negotiation was challenged by the US strategic ally, Saudi Arabia and Israel, both criticized the policy of the White House as an error. Behind security considerations, economic factor also played significant role in sealing the deal. What are the main reasons and dynamics behind the deal? This paper intends to review these dynamics by elaborating prominent reports and research findings.

Kesepakatan nuklir antara Iran dan Barat baru-baru ini membawa dampak signifikan bagi perubahan peta politik kawasan Timur Tengah. Banyak pihak beranggapan kesepakatan nuklir yang diinisiasi oleh Amerika Serikat merupakan bagian dari skenario untuk menjaga agar Timur Tengah tetap stabil. Sebab dalam lima tahun terakhir Amerika begitu kewalahan dalam menghadapi ancaman baik oleh aktor negara maupun non-negara. Setidaknya dengan tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran Amerika bisa terbebas dari potensi ancaman langsung senjata nuklir. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya berjalan lancar sebab negosiasi ini mendapat resistensi dari sekutu strategis Amerika, Arab Saudi dan Israel, keduanya mengkritik kebijakan Gedung Putih sebagai sebuah kesalahan. Di luar pertimbangan keamanan, faktor ekonomi ikut serta dalam tercapainya kesepakatan. Seperti apa persisnya dinamika yang terjadi? Paper ini hendak mengulas dinamika tersebut dengan mengelaborasi data-data terkini.

Keywords: kesepakatan nuklir; Iran; Barat; Timur Tengah

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling strategis dan menjadi bagian penting dinamika politik global, tensi ketegangan yang terjadi di kawasan ini selalu berdampak langsung terhadap kawasan di sekitarnya. Hal ini tidak lepas dari posisi geografis Timur Tengah dan sumberdaya alam yang mereka miliki. Terdapat sejumlah argumentasi yang dibangun oleh para sarjana untuk menjelaskan tentang pentingnya Timur Tengah baik dari sisi geografis, ekonomis, maupun ideologis. Simon Bromley dalam analisisnya menyebut terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengerti dinamika politik kawasan Timur Tengah. Pertama, dari sisi internal, keberadaan Islam sebagai agama turut serta menjelaskan identitas politik kawasan Timur Tengah, sebab peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selalu dikaitkan langsung dengan Islam disusul legitimasi lain berupa etnisitas Arab, konsekuensinya adalah Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme selalu relevan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik era 1950, 1960, 1979 hingga revolusi Arab Spring 2011.¹ Kedua, dari sisi eksternal, sumber daya alam, terutama minyak, menjadi salah satu alasan penting mengapa Barat hadir di kawasan ini, sebab industrialisasi yang terjadi telah dan sedang berlangsung di negara-negara Barat menyebabkan mereka mencari sebanyak mungkin sumber daya minyak. Dengan cadangan minyak yang melimpah, Barat hendak memastikan agar Timur Tengah menjadi penyuplai untuk kebutuhan negara-negara Barat.² Sementara Robert Kaplan dengan analisisnya yang khas terkait politik global dan pengaruh geografis menyebut lokasi yang strategis menjadi alasan utama mengapa para ilmuwan dan politisi harus tetap memerhatikan perkembangan Timur Tengah, sekaligus mempertegas predikat kawasan ini sebagai wilayah yang tidak pernah usai melakukan transisi. Stabilitas adalah cita-cita yang sangat sulit untuk dicapai di kawasan ini.³

Di luar analisa seputar faktor internal dan eksternal yang membentuk perkembangan politik di kawasan, sangat penting untuk mengetahui negara mana saja yang mejadi penentu stabil atau tidaknya kawasan Timur Tengah. Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir dan Turki adalah negara-negara yang dalam sejarahnya memiliki peran kunci dalam menentukan arah politik kawasan. Arab Saudi, memiliki modal kesuksesan ekonomi dan kepemilikan senjata yang sangat besar disusul oleh faktor kedekatan mereka dengan Amerika Serikat. Iran, kendati berada dalam situasi terjepit karena embargo DK PBB namun kemampuan mereka di bidang militer sangat memadai dan kepemilikan sumber daya minyak dan gas yang melimpah menjadi alasan ekonomi penentu kuatnya Iran, termasuk jika menempatkan kepemilikan instalasi nuklir sebagai bagian penting kekuatan Iran. Irak, sejak era Sadam Hussein dicitrakan sebagai salah satu negara paling agresif dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan dengan pendekatan militer, namun pasca perang Irak tahun 2003, negara ini mengalami penurunan pengaruh dan kekuatan lantaran belum mampu melakukan konsolidasi di level domestik dan masih mencari solusi untuk keluar dari krisis kepemimpinan yang melanda sejak perang Irak 2003 dan setelahnya.

Mesir, dalam banyak peristiwa politik menjadi aktor penting baik sebagai inisiator sentimen politik pan-Arabisme atau kesuksesan di bidang ekonomi dan militer, hingga hari ini Mesir tetap dipertimbangkan sebagai pihak yang harus diikutsertakan dalam menciptakan stabilitas di kawasan, untuk alasan geo-strategis negara-negara Eropa dan Amerika sangat menaruh harapan untuk kerjasama militer dengan rezim-rezim Mesir. Sementara Turki, kendati bukan negara yang secara geografis berada dalam zona tengah Timur Tengah, namun Turki memiliki warisan sejarah yang sangat besar era Ottoman dimana negara-negara Timur Tengah merupakan wilayah protektorat Sultan Ottoman di Istanbul. Dari perspektif masa kini, Turki merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer paling kuat di kawasan ini dan menjadi satu-satunya negara Muslim anggota aliansi pertahanan NATO.

Negara-negara di atas setidaknya menjadi pemain utama dalam setiap peristiwa politik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Peran mereka bisa dilacak dalam rekaman sejarah Timur Tengah. Adapun untuk peristiwa terkini, menempatkan aktor-aktor di atas sebagai pemain kunci selalu relevan untuk membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Sekilas Nuklir Iran

Secara singkat, logika negara yang berambisi untuk memiliki senjata nuklir adalah untuk mendapatkan rasa aman dan pada saat yang sama untuk menunjukkan kekuatan kepada pihak lain karena dengan memiliki senjata nuklir negara yang bersangkutan akan mendapatkan rasa hormat dari negara-negara tetangganya atau dalam istilah *security* dikenal dengan sebutan “deterrence.” Logika lainnya adalah memiliki nuklir untuk tujuan damai karena kebutuhan akan energi semakin hari semakin meningkat sehingga keberadaan energi nuklir sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya listrik negara-negara berkembang yang sedang gencar melakukan produksi. Ketika sebuah negara memasuki fase industrialisasi, maka menjadi sebuah kewajaran untuk mencari sumber daya listrik sebanyak mungkin.

Lembaga internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa telah memberikan petunjuk bagi negara-negara di dunia untuk menempatkan perdamaian di atas segala-galanya dan membujuk negara-negara untuk terlibat dalam perjanjian non-proliferasi nuklir, “Non-Proliferation Treaty (NPT).” Dalam perjanjian ini setiap negara yang menandatangani perjanjian diberikan akses untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, seperti untuk suplai energi listrik ataupun riset teknologi kesehatan dan produk-produk lain yang tidak berkaitan dengan senjata. Setiap negara yang terikat perjanjian ini harus terbuka dalam menjalankan aktifitas pengembangan nuklir

dengan memberikan akses kepada lembaga peninjau IAEA (International Atomic Energy Agency).⁴

Iran merupakan salah satu negara yang terlibat dalam perjanjian NPT, sehingga hak dan kewajiban negara penandatanganan tak terkecuali Iran melekat dengan sendirinya. Pada tahun 2003, Dewan Keamanan PBB melakukan peninjauan terhadap aktifitas pengembangan senjata nuklir di sejumlah kawasan yang diprediksi akan mengancam perdamaian dunia. Kegigihan Iran untuk melanjutkan program nuklir untuk tujuan “damai” tidak pernah dipercaya sepenuhnya oleh investigator internasional bidang nuklir seperti IAEA, begitu juga dengan Amerika yang mengambil kesimpulan berdasarkan temuan IAEA. Sikap Iran yang tidak terbuka membuat Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sejumlah sanksi berupa embargo terhadap Iran di bidang ekonomi, energi dan pertahanan.

Selama tiga belas tahun Iran hidup dalam situasi terkekang akibat embargo negara-negara Barat lewat resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Sanksi terhadap Iran membatasi negara teluk ini untuk mengakses pasar internasional secara bebas, sebab setiap transaksi yang melibatkan perusahaan Iran harus melewati pemeriksaan ekstra ketat dari otoritas internasional. Ilmuan-ilmuan Iran yang terlibat dalam aktifitas riset nuklir turut serta menjadi pihak yang kebebasan mereka untuk bepergian ke luar negeri sangat dibatasi. Dampak paling serius dari embargo yang diterapkan PBB adalah ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam aktifitas jual beli sumber daya minyak di pasar internasional, padahal di sisi lain negara ini merupakan produsen terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Venezuela.

Sanksi dan embargo dari negara-negara Barat dalam dua dekade terakhir tidak membuat Iran pasrah menerima nasib mereka digantung oleh keputusan DK PBB. Dibawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad Iran terus tampil dengan narasi menantang ketidakadilan yang diciptakan oleh negara-negara Barat. Kepemilikan senjata nuklir oleh sejumlah negara di satu sisi mendapat jaminan, namun di sisi lain negara-negara yang mengembangkan nuklir untuk tujuan damai justru diposisikan sebagai pihak paling bersalah dalam tata aturan global. Ahmadinejad secara terbuka menggunakan panggung PBB untuk mengkritisi sikap ambivalen negara-negara Barat dalam melihat Iran dan Israel dengan pendekatan berbeda. Konsistensi sikap Iran untuk mengembangkan riset nuklir untuk tujuan damai pada instalasi yang mereka miliki tidak pernah berubah selama dua periode kepemimpinan Ahmadinejad.

Hingga akhirnya pada Juni 2013 pemilihan presiden Iran menghasilkan figur pemimpin baru yaitu Hassan Rouhani yang tampil sebagai pemenang dalam konstestasi yang melibatkan figur Rouhani dan walikota Teheran Mohammad Bagher Galibaf dengan menawarkan pendekatan berbeda dalam

menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Iran dengan komunitas internasional. Di bawah kepemimpinan Hassan Rouhani, Iran tampil dengan *gesture* yang sangat kontras dengan pendahulunya. Rouhani mencitrakan diri sebagai figur moderat baik dari sisi personal maupun kebijakan.⁵

Awal mula terbukanya pintu perundingan nuklir adalah ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Iran Hassan Rouhani melakukan sambungan telepon langsung pada akhir September 2013. Dalam percakapan bersejarah yang berlangsung selama lima belas menit itu menjadi babak baru bagi hubungan kedua negara yang sejak tiga dekade mengalami kebekuan.⁶ Di masa lalu Iran, terutama pada era Shah Reza Pahlevi, Iran merupakan sekutu penting Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun ketika Iran mengalami revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khomeini pada tahun 1979 semua memori indah hubungan Amerika-Iran berubah drastis ketika kedutaan besar Amerika di Teheran dikepung oleh demonstran. Pasca kejadian pengepungan kantor perwakilan Amerika di Iran hubungan dua negara tak pernah membaik dan cenderung tegang. Pada saat bersamaan negara-negara Barat seperti Amerika dan Inggris menarik duta besar mereka dari Iran.

Tindak lanjut dari sambungan telepon Obama dan Rouhani adalah penjajakan sejumlah opsi perundingan yang melibatkan Sekretaris Negara John Kerry dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Pilihan Iran menunjuk menteri luar negeri Javad Zarif yang memiliki latar belakang pendidikan Amerika mengindikasikan pendekatan Iran yang mulai berubah dalam merespon dinamika politik global.⁷ Kontak diplomatik antara dua perwakilan negara ini tergolong sangat intens dan panjang mengingat perundingan-perundingan yang telah dilakukan sempat menemui kebuntuan hingga akhirnya pertemuan di Vienna, Austria menjadi titik terang arah negosiasi nuklir Iran.

Tercapainya Perundingan Nuklir: Iran dan Barat

Pada 14 Juli 2014 kesepakatan di bidang nuklir antara Iran dan Barat akhirnya tercapai. Kesepakatan yang dihasilkan oleh P5+1 (Amerika, Russia, China, Inggris, Perancis dan Jerman) merupakan hasil dari pertemuan maraton yang diinisiasi oleh Menlu John Kerry dan para pemimpin Uni Eropa dengan harapan ketegangan internasional bisa dihindari ketika satu per satu negara yang tadinya memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata nuklir berhasil dibujuk untuk tidak melanjutkan operasional nuklir untuk senjata.

Komponen yang ada dalam perjanjian "Join Comprehensive Action Plan atau JCPOA" disebutkan bahwa Iran harus membatasi kapasitas aktifitas riset nuklir untuk pembuatan senjata. Iran harus mengurangi stok pengayaan uranium untuk membuat reaktor dan senjata nuklir hingga 98 % atau setara 300 kg (660lb) selama 15 tahun. Iran juga harus memutus dua pertiga paket

instalasi uranium menjadi 5.060 instalasi pengayaan uranium selama sepuluh tahun. Jika Iran mematuhi perjanjian ini, maka mereka mendapat kompensasi berupa pencabutan sanksi dari PBB, Amerika dan Uni Eropa termasuk pengembalian sejumlah aset yang selama ini dibekukan sebesar 100 milyar dollar Amerika di luar negeri. Adapun jika Iran melanggar perjanjian maka dengan sendirinya sanksi-sanksi yang sebelumnya diterima berlaku secara otomatis.⁸

Beberapa saat setelah negosiasi menemukan hasil, Obama menggelar konferensi pers di Gedung Putih yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan dari negosiasi tersebut adalah agar persebaran senjata nuklir di kawasan Timur Tengah bisa dikontrol dan masyarakat internasional bisa memastikan bahwa Iran akan tunduk untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pada saat bersamaan Obama ingin dikenang sebagai rezim yang telah berhasil menggunakan pendekatan diplomasi untuk menekan musuh yang berpotensi mendatangkan ancaman langsung bagi Amerika dan mengatakan untuk tidak bernegosiasi dibawah rasa takut, tetapi tidak takut untuk melakukan negosiasi dengan mengutip pernyataan mantan presiden John F. Kennedy, "one more chapter in our pursuit of a safer, more helpful and more hopeful world... let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate."⁹

Argumen yang disampaikan oleh Obama terkait perjanjian nuklir dengan Iran adalah agar Amerika terbebas dari potensi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika yang bisa datang dari negara yang memiliki senjata nuklir. Iran merupakan salah satu negara yang dicatat oleh Amerika, terutama pada era Presiden George W. Bush sebagai negara yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Bahkan, Bush memasukan Iran sebagai salah satu negara poros Setan "Axis of Evil" bersama Korea Utara dan Irak pada bulan Januari 2002 dan diucapkan berulang kali dalam acara resmi kenegaraan. Sikap keras Amerika terhadap Iran mendapat respon serupa dari pemimpin spiritual Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khomeini, yang menyebut Amerika sebagai "Setan Besar" dan Israel sebagai "Setan Kecil." Lahirnya adagium-adagium ini secara sederhana menjelaskan dinamika hubungan Amerika-Iran yang tidak pernah membaik sejak peristiwa revolusi 1979.

Obama hadir dengan pendekatan berbeda dalam menghadapi Iran, berhadapan dengan pemimpin Iran yang lebih moderat. Amerika di bawah kepemimpinan Obama mencoba untuk menggunakan pendekatan diplomasi untuk merubah haluan negara-negara yang selama ini menjadi "musuh" Amerika. Untuk alasan meninggalkan warisan kepemimpinan pada periode kedua kepemimpinannya, Obama memberi tugas khusus kepada John Kerry untuk membuka lembaran baru dengan negara-negara yang selama ini menutup pintu diplomatik dengan Amerika. Khusus untuk Iran, isu yang muncul di depan adalah kepemilikan nuklir dan embargo bidang ekonomi yang

membuat Iran tidak bisa berbuat banyak dalam panggung perdagangan internasional.

Melihat konteks perjanjian nuklir Iran, bisa dikatakan negosiasi ini memiliki kaitan langsung dengan upaya Amerika untuk memperkuat kembali pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah yang tak lagi stabil karena ancaman yang datang dari aktor non negara seperti *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS yang tak mampu diselesaikan oleh sekutu-sekutu Amerika di kawasan. ISIS secara tidak langsung memecah konsentrasi Amerika yang tengah mengupayakan stabilitasi negara-negara pasca perang dan pasca-revolusi mulai dari Mesir, Irak, dan terakhir Suriah. Keberadaan ISIS yang awalnya sangat kecil, belakangan mendapat pengikut dari warga negara yang berasal tidak hanya dari negara Muslim, tetapi dari negara-negara Barat juga ikut bergabung dengan gerakan pimpinan Abu Bakr Al Baghdady ini. Destabilitas adalah situasi yang tidak diharapkan oleh Amerika setelah mereka mengurangi personel militer di kawasan Timur Tengah. Namun dengan kehadiran kelompok ISIS membuat rencana Amerika sedikit mengalami perubahan. Dalam situasi ini Amerika mengharapkan Iran yang memiliki kemampuan militer mumpuni untuk bisa tampil sebagai pihak yang turun menyelesaikan epidemik ISIS.

Pertimbangan lain dari perjanjian ini, jika melihat konteks berlangsungnya perjanjian adalah kemampuan Iran untuk memproduksi minyak dalam jumlah besar yang mencapai 2 juta barel per hari diharapkan akan mampu menjadi mitra bagi Amerika yang membutuhkan suplai energi dalam jumlah lebih besar, sekaligus mengimbangi pengaruh Rusia yang begitu kuat terhadap Iran. Dalam satu dekade terakhir, Iran tidak memiliki akses pasar yang kuat karena terhalang oleh embargo negara-negara Barat. Pada saat bersamaan Iran tidak memiliki teknologi mutakhir dalam eksplorasi minyak sehingga ekspektasi untuk mengambil minyak dalam jumlah besar tidak pernah tercapai. Jika proses perjanjian berjalan lancar, sejumlah pihak terutama perusahaan Amerika dan Inggris yang bergerak di bidang perminyakan seperti Shell, Chevron dan British Petroleum berharap bisa ikut ambil bagian dalam proyek eksplorasi minyak dan gas Iran. Dengan ekspektasi teknologi baru dari Barat bisa memberikan sumbangsih 3,3 juta barel per hari untuk minyak Iran. Skenario para pengusaha Amerika dan Eropa sangat realistis dengan kepemilikan cadangan minyak Iran, sementara Iran sangat membutuhkan teknologi dan dukungan Barat untuk menjangkau pasar internasional.¹⁰

Implikasi Perjanjian: Berubahnya Peta Aliansi

Hasil ini, seperti telah diprediksi sebelumnya, tidak lantas membuat semua pihak bahagia sebab konsekuensi dari kesepakatan terkait nuklir Iran akan memberikan manfaat tersendiri bagi Iran karena mulai mendapat akses

lebih luas untuk pergaulan internasional. Salah satu butir kesepakatan menyebutkan bahwa Iran akan mendapat bantuan finansial terkait sikap taatnya pada kesepakatan yang telah dicapai. Jika Iran mengikuti aturan maka Iran akan mendapat kompensasi dana bantuan. Namun jika bertindak sebaliknya maka Iran akan menerima konsekuensi sendiri.

Meskipun demikian, niat Obama untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran tidak sepenuhnya berjalan mulus sebab ada sejumlah rintangan yang harus dilewati, baik di level internal maupun eksternal. Pada level internal bisa disebut sebagai dimensi politik domestik sebab pasca perundingan Vienna keputusan untuk menerima atau menolak hasil perundingan sangat ditentukan oleh anggota kongres dan senator Amerika yang didominasi oleh kubu Republik. Dalam banyak kesempatan, pihak Republik tidak pernah satu suara dengan kebijakan Obama apalagi pendekatan politik luar negeri kubu Republik sangat menekankan pentingnya bersikap keras terhadap pihak-pihak yang membawa potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika. Untuk kasus Iran, salah satu opsi yang mereka tawarkan adalah menggunakan serangan militer untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain pihak kongres, tidak bisa dipungkiri bahwa lobi AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) yang pro Israel sangat menentang kebijakan lunak Obama karena suara lembaga lobi ini selalu menyuarakan pernyataan-pernyataan pemimpin Israel.¹¹ Sementara di pihak Iran, kendati presiden Rouhani dan Menlu Javad Zarif telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan lobi dengan Barat, namun persoalan belum tuntas karena setiap kebijakan strategis harus menunggu persetujuan pemimpin spiritual tertinggi Iran atau "wilayatul faqih" dalam hal ini Ayatollah Ali Khomeini. Salah bentuk koordinasi kuat pemimpin spiritual Iran adalah ketika Menlu Javad Zarif harus terbang dari Vienna ke Teheran sehari sebelum pembicaraan akhir negosiasi nuklir untuk melakukan konsultasi.

Sementara pada level eksternal atau bisa disebut sebagai dimensi internasional, tantangan datang dari sekutu-sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah yang menunjukkan sikap pertentangan dengan sikap Washington seperti diperlihatkan oleh Israel lewat Perdana Menteri Netanyahu yang sejak awal sangat resisten terhadap rencana negosiasi antara Iran dan P5+1. Sikap Israel tidak pernah berubah dengan narasi yang selalu disuarakan dalam forum-forum Sidang Umum PBB yang intinya kepemilikan nuklir Iran adalah ancaman dunia internasional, sembari menunjukkan ilustrasi perkembangan riset nuklir Iran yang tinggal menunggu waktu untuk menjadi senjata. Setelah kesepakatan tercapai, Israel tetap berpendirian pada sikap mereka sebelumnya.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh sekutu Amerika lainnya, yaitu Arab Saudi yang sejauh ini telah menunjukkan sikap berbeda dengan Amerika untuk beberapa isu, mulai dari sikap Arab Saudi yang melepaskan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebagai protes terhadap Amerika yang tidak tegas

terhadap Iran terkait gerak Iran di kawasan Timur Tengah untuk isu ISIS, Yaman dan Suriah. Langkah terbaru Arab Saudi adalah menghimpun dukungan dari negara-negara Teluk yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) beranggotakan Arab Saudi, United Arab Emirates, Kuwait, Oman, Bahrain dan Qatar, untuk menentang manuver Iran di kawasan. Negara-negara ini sangat menentang keras sikap Iran yang memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang mencoba merubah konstelasi politik di Irak, Suriah dan Yaman sekaligus menguatkan pengaruh di negara-negara tersebut. Sikap negara Teluk sedikit melunak setelah John Kerry memberikan jaminan bahwa kerjasama dengan negara-negara Teluk adalah prioritas dan berjanji untuk melakukan tukar menukar data intelejen secara intens, pada saat bersamaan mempercepat transfer senjata mutakhir untuk memperkuat mitra strategis Amerika di Teluk.¹²

Khusus untuk Arab Saudi, jauh sebelum kesepakatan nuklir Iran tercapai, pihak Arab Saudi telah menunjukkan protesnya terhadap Amerika karena bersikap ambivalen dalam merespon perkembangan isu kawasan Timur Tengah, mulai dari isu ISIS hingga perkembangan senjata nuklir Iran. Cara yang digunakan Arab Saudi adalah dengan memanfaatkan pengaruhnya di organisasi eksportir minyak OPEC dalam mempengaruhi harga minyak dunia yang hingga hari ini mengalami penurunan sangat signifikan. Sementara dalam panggung diplomasi internasional, Arab Saudi secara terang-terangan menolak untuk duduk di kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang kemudian jatah kursi ini diberikan kepada Jordan. Penolakan kursi Anggota DK PBB tersebut sebagai bentuk protes keras Arab Saudi terhadap Amerika. Hal ini terus berlanjut ketika Arab Saudi melakukan serangan udara terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman sebagai jawaban atas permintaan Presiden Yaman yang melarikan diri dari Yaman karena dikepung oleh pemberontak Houthi yang secara ideologi memiliki afiliasi langsung dengan Syiah-Iran.

Kesimpulan

Bagi rakyat Iran, tentu saja negosiasi ini merupakan babak baru dalam sejarah mereka setelah memutus hubungan dengan Amerika pada tahun 1979 ketika Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini terjadi. Dalam tiga dekade terakhir, Iran mengalami sendiri bagaimana rasanya menerima sanksi dari PBB dan embargo bidang ekonomi dari Amerika dan Eropa. Kendati mereka bisa bertahan, namun akses pasar internasional yang terbatas tentu saja membuat Iran kesulitan untuk menjual komoditas yang mereka miliki, khususnya energi yang melimpah namun sangat kesulitan untuk mencari pasar.

Untuk beberapa alasan, tentu saja negosiasi ini perlu mendapat apresiasi karena berhasil meyakinkan semua pihak. Dalam jangka pendek sudah pasti

pencabutan sanksi ekonomi akan membuat ekonomi Iran lebih baik dan akan lebih aktif menjangkau pasar-pasar potensial Eropa dan Amerika. Seperti tren global pada umumnya, negara yang memiliki ekonomi baik akan mampu memainkan peran strategis di kawasan. Iran kendati berada dalam situasi sulit masih bisa bermain aktif di kawasan. Atas dasar itu, boleh jadi Iran akan lebih aktif ketika level ekonomi mereka sangat baik.

Komunitas internasional sudah pasti memiliki harapan dengan tunduknya Iran pada petunjuk rezim non-proliferasi nuklir. Oleh karena itu, kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir bisa dihindari kendati sejumlah negara masih belum menerima klausul untuk tunduk pada rezim ini. Ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah kerap dipicu oleh kepemilikan senjata, terutama senjata nuklir salah satu negara, sehingga dengan adanya kontrol pihak internasional ketegangan bisa diredam secara efektif. Dengan tercapainya perjanjian nuklir maka terdapat kemajuan dalam proses negosiasi para pihak yang selama ini cenderung saling curiga ketika duduk di meja-meja perundingan untuk membahas isu internasional. Keterlibatan P5+1 dalam mengawal proses perundingan juga menjadi sinyal positif bahwa negara-negara besar yang memiliki pengaruh di PBB tidak selamanya bersikap oposisi biner antara satu dengan yang lain namun masih ada peluang untuk bersepakat dalam sebuah perjanjian.

Amerika punya peran besar dalam tercapainya persetujuan tersebut karena inisiatif yang datang dari Gedung Putih secara eksplisit merepresentasikan kekhawatiran tentang ancaman yang bisa datang dari negara manapun yang memiliki senjata nuklir. Tetapi Amerika juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari negara besar lainnya. Sidang Umum PBB atau Sidang DK PBB merupakan forum yang tidak pernah efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang menuntut solusi cepat. Adanya klausul satu veto negara anggota DK PBB menggugurkan kesepakatan resolusi hingga hari ini menjadi bahan perdebatan para pemimpin dunia karena dalam banyak isu misi menyelamatkan dunia dan kemanusiaan harus dinegasikan hanya lantaran veto salah satu anggota.

Isu Suriah dan beberapa negara yang menjadi korban perang sipil adalah contoh terkini tentang minimnya komitmen negara-negara besar untuk mengesampingkan kepentingan nasional mereka. Kokohnya rezim Bashar Asad dan kian meningkatnya angka pengungsi dari Suriah merupakan pemandangan umum yang berlangsung selama lima tahun pasca krisis Arab Spring. DK PBB menutup mata dengan gelombang pengungsi yang mencapai angka jutaan jiwa di saat PBB mengkampanyekan perdamaian dan pemeliharaan martabat manusia, begitu juga UNHCR yang tampak kewalahan dengan kian banyaknya pengungsi akibat perang di Timur Tengah. Norma-norma ideal tentang migrasi manusia juga seolah mendapat resistensi dari negara-negara Eropa karena

tidak memberikan ruang untuk imigran meskipun dari negara yang sedang ditimpa perang.

Konteks perjanjian nuklir Iran hadir di antara persoalan-persoalan kemanusiaan di atas. Senjata nuklir ditakuti karena daya ledak yang begitu besar dan dapat mengancam penduduk bumi. Seharusnya pendekatan yang sama juga digunakan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah. Masing-masing negara sudah seharusnya mengedepankan standar moral maksimal untuk mengembalikan mereka yang lari dari tanah air dan menciptakan rasa aman bagi seluruh penduduk dunia dalam bingkai perdamaian dan kemanusiaan.

Catatan Akhir

¹ Dalam konteks hubungan agama dan kekuasaan, Bernard Lewis memberi ilustrasi tentang bagaimana Islam tidak bisa dipisahkan dengan dinamika politik kekuasaan di Timur Tengah. Islam telah membentuk komunitas masyarakat Timur Tengah berdasarkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga membawa pada perbedaan konsepsi hubungan antara agama dan negara. Lewis menyebut di Barat yang identik sebagai komunitas negara Kristen "Christendom" sangat mudah untuk meninggalkan afiliasi keagamaan mereka ketika berbicara urusan negara namun hal itu tidak berlaku dalam komunitas negara-negara Muslim. Sementara untuk kawasan Timur Tengah, otoritas keagamaan menjadi salah satu sumber legitimasi bagi para pemimpin di kawasan ini baik yang memilih demokrasi atau autokrasi sebagai sistem kenegaraan. Secara detail bisa dilihat dalam Bernard Lewis, *Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 131-151. Sementara untuk mengetahui konfigurasi sosial politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau kerap disingkat dengan sebutan "MENA, Middle East and North Africa" pasca peristiwa Arab Spring yang telah merubah struktur politik di kawasan ini. Tariq Ramadan adalah salah satu figure yang memiliki perhatian serius terkait fenomena yang berlangsung di kawasan ini. Dalam pandangan Ramadhan, kehadiran kelompok kelas menengah yang mendapat akses informasi dan berinteraksi dengan institusi Barat membuat mereka memiliki definisi baru tentang konsepsi bernegara dan sistem apa yang tepat untuk mengelola negara. Pengaruh eksternal menjadi alasan mengapa perubahan itu terjadi dan mengapa hal itu terjadi saat ini. Lihat Tariq Ramadan, *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East*, (London: Penguin Books, 2012), ix-xiii.

² Simon Bromley, *Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development* (New York: Polity Press, 1993), 84-87.

³ Robert D. Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflict and the Battle Against Fate* (New York: Random House, 2013), 66.

⁴ Kendati rezim non-proliferasi nuklir telah ditetapkan oleh PBB, namun tidak semua negara terlibat dalam perjanjian ini sehingga pihak-pihak yang tidak terlibat dianggap berpotensi menciptakan ketegangan di kawasan dimana mereka tinggal. Beberapa negara yang tidak terikat dalam perjanjian ini diantaranya adalah Israel, India, Pakistan dan Korea Utara. Untuk penjelasan detail terkait kepemilikan senjata nuklir dan mekanisme kerja rezim NPT bisa dilihat dalam M. Sya'roni Rofii, "Membayangkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir: NPT dan Post-agreement Negotiation", *Jurnal Multiversa*, Vol. 01 No. 2, Oktober 2010.

⁵ "Hassan Rouhani wins Iran presidential election," *BBC News*, 15 Juni 2013, dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22916174>.

⁶ "Obama, Iran's Rouhani hold historic phone call", *Reuters*, 28 September 2013, dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.reuters.com/article/2013/09/28/us-un-assembly-iran-idUSBRE98Q16S20130928>.

⁷ Terkait kebijakan luar negeri Iran era Rouhani, sangat tercermin dalam pandangan Javad Zarif dalam artikelnya di *Foreign Affairs* yang melakukan rekonsepsi atas nilai-nilai tradisional Iran dan menggunakan pendekatan yang lebih moderat dalam menyelesaikan persoalan domestik dan internasional. Lihat Mohammad Javad Zarif, "What Iran Really Wants Iranian Foreign Policy in the Rouhani Era", *Foreign Affairs*, May/June 2014.

⁸ "Iran nuclear crisis: Six key points", *BBC*, 14 Juli 2015, dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32114862>.

⁹ *Time*, 14 July 2015 dalam White House official Twitter.

¹⁰ *Foreign Policy*, 14 July 2015.

¹¹ 'Loose Talk of War' Only Helps Iran, President Says", *New York Times*, 4 Maret 2012, dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.nytimes.com/2012/03/05/world/middleeast/in-aipac-speech-obama-warns-against-loose-talk-of-war>.

¹² "Gulf allies 'back Iran nuclear deal' after US security guarantees" *BBC News*, 3 August 2015, dilihat 26 Agustus 2015, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939>.

Daftar Pustaka

Bromley, Simon. *Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development*. New York: Polity Press, 1993.

BBC News, 15 Juni 2013. "Hassan Rouhani wins Iran presidential election." Dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22916174>.

_____, 14 Juli 2015, "Iran nuclear crisis: Six key points dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32114862>, akses 25 Agustus 2015.

_____, 3 Agustus 2015. "Gulf allies 'back Iran nuclear deal' after US security guarantees." Dilihat 26 Agustus 2015. dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939>.

Foreign Policy, 14 July 2015.

Kaplan, Robert D. *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflict and the Battle Against Fate*. New York: Random House, 2013.

Lewis, Bernard. *Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

New York Times, 4 Maret 2012. "'Loose Talk of War' Only Helps Iran, President Says." Dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.nytimes.com/2012/03/05/world/middleeast/in-aipac-speech-obama-warns-against-loose-talk-of-war>.

Reuters, 28 September 2013. "Obama, Iran's Rouhani hold historic phone call." Dilihat 25 Agustus 2015, <http://www.reuters.com/article/2013/09/28/us-un-assembly-iran-idUSBRE98Q16S20130928>.

Ramadan, Tariq. *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East*. London: Penguin Books, 2012.

Rofii, M. Sya'roni. "Membayangkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir: NPT dan Post-agreement Negotiation." *Jurnal Multiversa*, Vol. 01 No. 2, Oktober 2010.

Time, 14 July 2015

White House official Twitter.

Zarif, Mohammad Javad. "What Iran Really Wants Iranian Foreign Policy in the Rouhani Era." *Foreign Affairs*, May/June, 2014.